

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Untuk mengetahui tingkat perkembangan inflasi kabupaten/kota se-Provinsi NTT, maka ada lima kabupaten/kota sebagai pengukur inflasi. Inflasi yang terjadi pada bulan Maret 2025 untuk 5 kabupaten/kota sebagai pengukuran inflasi adalah sebagai berikut :

1. Kota Kupang, mengalami inflasi sebesar 1,19 % (YOY)
2. Maumere, mengalami inflasi sebesar 4,25 % (YOY)
3. Waingapu, mengalami inflasi sebesar 2,77 % (YOY)
4. Kabupaten TTS, mengalami inflasi sebesar 2,52 % (YOY)
5. Kabupaten Ngada, mengalami inflasi sebesar 2,17 % (YOY)

Maumere mengalami inflasi yang cukup tinggi berada diatas target sasaran. Dengan IHK sebesar 107,82 % dan inflasi terendah terjadi di Kota Kupang dengan IHK sebesar 107,03 %.

Untuk mengetahui tingkat inflasi kabupaten Timor Tengah Utara dapat menggunakan pendekatan wilayah sebagai pengukur inflasi yaitu daerah kabupaten Timor Tengah Selatan yang pola konsumsinya hampir sama. Dengan demikian inflasi pada Maret 2025 di Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar 2,52 % dari Tahun ke Tahun (YOY).

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Klasifikasi permasalahan :

Adapun kenaikan di beberapa komoditas seperti : bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai keriting, ayam ras, telur ayam, ras, dan beras menjelang HBKN.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Dalam upaya pengendalian Inflasi khususnya dalam menyikapi melonjaknya harga komoditas maka Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan Gerakan Pangan Murah di semua wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara menjelang HBKN (Idul Fitri dan Hari Raya Paskah)
- Mengikuti Rapat Koordinasi Nasional TPID Kabupaten/Kota dan Provinsi NTT bersama Kemendagri pada setiap hari senin
- Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) untuk 18 kelompok tani dengan pengembangan tanaman hortikultura seperti sawi, tomat, kangkung, terung, paria, kacang panjang, dan cabai rawit. Untuk Triwulan I kegiatan ini sementara di 5 Kecamatan

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Program kerja TPID yang dilaksanakan secara berkala dievaluasi untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dan mengambil langkah-langkah lebih lanjut sebagai upaya untuk mengatasi dan mengendalikan inflasi daerah.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) keliling dengan mobil pasda 24 Kecamatan sesuai jadwal
2. Melaksanakan sidak pasar dan distributor agar tidak menahan dan menimbun barang
3. Dinas Pertanian melalui Fasilitator lapangan melakukan pendampingan kepada kelompok tani untuk menanam tanaman
4. Melakukan pemantauan dan pendataan pergerakan harga dan ketersediaan stok bahan pokok sebagai laporan harian
5. Melaksanakan gerakan menanam yang secara teknis dilaksanakan oleh anggota TPID dan Dinas Pertanian serta Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU